



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 12780-12790

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Kel. Nai Pos-Pos Barat, Kec. Sorkam)

Evi Dwi Anita Simatupang¹, Septria Susanti²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

¹eviwianitasimatupang@gmail.com, ²septriasusanti@uinbukittinggi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya evaluasi program bantuan sosial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Fokus utama studi ini adalah menganalisis pelaksanaan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, Kecamatan Sorkam, melalui tinjauan ekonomi Islam serta pengaruhnya terhadap kondisi kesejahteraan penerima manfaat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui sejauh mana prinsip ketepatan sasaran telah diimplementasikan sesuai nilai-nilai syariah dan bagaimana bantuan tersebut berdampak secara riil terhadap pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus riset lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan informan penelitian kepada berbagai pihak terkait, meliputi perangkat kelurahan, agen E-Warung, hingga Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi, data yang sudah diperoleh lalu dianalisis menggunakan teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa program BPNT telah membantu meringankan beban pengeluaran pangan masyarakat, yang sejalan dengan konsep falah (kesejahteraan) dalam ekonomi Islam. Namun, kendala administratif berupa ketidakakuratan data pada sistem DTKS masih menjadi hambatan utama yang memicu ketidaktepatan sasaran. Kesimpulannya, penguatan pengawasan dan transparansi data menjadi syarat mutlak agar distribusi bantuan dapat mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat.

Kata kunci: Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Ekonomi Islam, Kesejahteraan Masyarakat, Keadilan Distribusi, Kemiskinan

1. Pendahuluan

Ekonomi Islam menekankan konsep zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrument redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial, sebagaimana dijelaskan dalam Al-qur'an (QS At-Taubah: 60) yang mengatur distribusi zakat untuk fakir, miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Dan memberi bantuan kepada yang membutuhkan dapat diartikan sebagai kegiatan tolong menolong kepada umat manusia tanpa melihat suku, ras, dan agama apapun, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dalam pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Ayat ini menjelaskan bahwa segala bentuk perbuatan baik (kebajikan) yang mendatangkan manfaat bagi individu dan masyarakat, seperti menjalankan ibadah, menuntut ilmu, berbuat adil, dan membantu mereka yang membutuhkan. Tolong menolong dalam hal ini berarti saling mendukung dan memudahkan agar perintah-perintah agama dapat terlaksana dengan baik dan efektif. Konsep ta'awun mengajarkan agar bantuan diberikan secara adil dan merata kepada yang berhak tanpa deskriminasi, memastikan bantuan

tersebut benar-benar bermanfaat. perspektif islam menambahkan dimensi spiritual dan etis, dimana bantuan tidak hanya bersifat material tetapi juga membangun ukhuwah (persaudaraan) dan kemandirian umat.

Namun, Implementasi pemerintah seperti BPNT seringkali belum sepenuhnya selaras dengan nilai-nilai islam, seperti transparansi (amanah) dan keadilan (adl), yang dapat menyebabkan efisiensi dan ketidakpuasan penerima. Bantuan Pangan Non Tunai memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengelolaan yang efektif dan tepat sasaran. BPNT dirancang untuk memberikan dukungan kepada keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Namun, dalam praktiknya program ini sering mengalami kendala terutama dalam hal distribusi dan pemanfaatan bantuan sehingga menghambat tepat sasaran dan tepat waktu penyaluran bantuan.

Mulai tahun 2017, penyaluran BPNT, dilakukan di beberapa lokasi dengan fasilitas dan akses yang memadai. Selain menawarkan pilihan makanan, penyaluran BPNT juga dilakukan melalui sistem perbankan untuk mendorong perilaku produktif dengan memungkinkan penerima untuk menarik bantuan sesuai kebutuhan. Melalui akses layanan keuangan yang lebih luas, penyaluran BPNT akan berpengaruh pada meningkatkan kesejahteraan penerima. Salah satu daerah di Sumatera Utara yang telah menerima penyaluran bantuan sembako non tunai adalah di Kabupaten Tapanuli Tengah, Kecamatan Sorkam. Dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, Kecamatan Sorkam. Sejak tahun 2019 penyaluran bantuan sembako ini sudah diterapkan di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, kecamatan Sorkam yang dapat membantu mengatasi kemiskinan. Dampak dari BPNT terhadap kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian utama. Kelurahan Nai Pos-Pos Barat memiliki 147 KK dengan jumlah penduduk sebanyak 596 jiwa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Kependudukan dan jumlah penerima program BPNT

Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Penerima Program BPNT
596 Jiwa	147	44

Sumber Data: Kantor Kel. Nai Pos-Pos Barat, Kec.Sorkam 2025

Tabel 1.2
Data Penduduk Menurut Kelompok

Lansia	Penyandang Disabilitas	Tidak Menerima Bantuan Ganda
27	3	12

Sumber Data: Kantor Kel. Nai Pos-Pos Barat, Kec.Sorkam 2025

Tabel 1.3
Data Pekerjaan Penduduk

Petani	PNS	Buruh	Nelayan	Karyawan Swasta
270	19	35	111	22

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tapanuli Tengah 2023-2025

Berdasarkan data tabel diatas maka dapat disimpulkan Implementasi BPNT di area ini, data menunjukkan adanya sejumlah keluarga yang berhak menerima tetapi juga mencerminkan adanya tantangan dalam menjangkau seluruh populasi yang membutuhkan. Ketersediaan jenis pekerjaan di masyarakat juga perlu dipertimbangkan dalam merencanakan jenis pangan apa yang akan disediakan melalui program ini. Program BPNT diharapkan dapat menjangkau semua kelompok masyarakat, terutama yang paling rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, demi mencapai tujuan program dalam meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan pangan secara keseluruhan

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini adalah penelitian lapangan, yang merupakan teknik untuk menemukan secara khusus dan realistis dalam kehidupan atau kondisi nyata, yang melibatkan pendokumentasian dan pengumpulan berbagai fakta dan informasi yang ditemukan di lapangan dan menggabungkannya dengan data yang diperoleh dari buku.

3. Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi tepat sasaran program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam perspektif ekonomi islam di Kel. Nai Pos-Pos Barat, Kec. Sorkam

Program BPNT ini diperluas secara bertahap ke seluruh kota dan kabupaten di Indonesia mulai tahun 2018 seiring dengan kesiapan sarana prasarana penyaluran non tunai. Sejak awal program bantuan ini diberikan dalam bentuk saldo kartu elektronik (Kartu Keluarga Sejahtera) yang dapat digunakan di E-Warung untuk membeli bahan pangan.

Sejak 2018, penyaluran program bantuan pangan non tunai akan dilakukan di Indonesia dengan infrastruktur dan akses yang memadai, salah satunya Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, Kecamatan Sorkam. Program bantuan pangan non tunai merupakan insiatif pemerintah yang bertujuan memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang kurang mampu. Berikut adalah data penerima BPNT di kelurahan Nai Pos-Pos Barat:

Tabel 4.1
Data Jumlah Penerima BPNT
di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat Kecamatan Sorkam.

No.	Tahun	Jumlah Penerima BPNT Kelurahan Nai Pos-Pos Barat
1.	2020	55 orang
2.	2021	47 orang
3.	2022	49 orang
4.	2023	49 orang
5.	2024	49 orang
6.	2025	44 orang

Sumber Data: Kantor Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, Kecamatan Sorkam

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah penerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat menunjukkan variasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, terdapat 55 orang penerima, yang menunjukkan kebutuhan mendesak di kalangan masyarakat saat itu. Namun, jumlah tersebut mengalami penurunan drastis menjadi 47 orang pada tahun 2021. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh perbaikan kondisi ekonomi atau perubahan sistem dalam pendataan penerima bantuan.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara mendalam dengan beberapa informan untuk mengumpulkan data mengenai implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat. Melalui wawancara, peneliti berusaha menggali perspektif dan pengalaman individu yang terlibat langsung, baik sebagai pengelola maupun penerima bantuan. Seperti hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Lurah Sentot Situmeang, menyatakan bahwa:

“Saya percaya bahwa sebagian besar masyarakat yang menerima BPNT di sini memang layak. Karna kami pihak Kelurahan sudah melakukan pendataan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di mana data sudah kami sesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan. Penyaluran BPNT ini juga terus terang kami sampaikan kalau yang menerima sembako ini masyarakat yang kurang mampu. Bantuan ini juga kami sampaikan jelas bahwa BPNT di cairkan di E-warung yang

kami tunjuk di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat. Pelaksanaan Program BPNT di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat ini, sangat membantu lah, karna setiap bulannya ada bantuan yang bisa membantu memenuhi kebutuhan seperti beras dan sembako lainnya.”

Dalam wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Lurah Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, terungkap bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah ini diupayakan untuk tepat sasaran. Bapak Lurah menjelaskan bahwa pendataan penerima bantuan menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang dirancang untuk mencocokkan data dengan kondisi nyata dilapangan. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya yang serius untuk memastikan bahwa mereka yang menerima BPNT benar-benar berasal dari kalangan masyarakat yang kurang mampu.

Dalam pandangan ekonomi Islam, penyaluran bantuan ini sangat penting karena bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan bagi mereka yang paling membutuhkan. Selain itu, penyaluran bantuan melalui E-warung yang ditunjuk juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal. Bapak Lurah menekankan bahwa program BPNT ini telah membantu banyak masyarakat memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari, seperti beras dan sembako lainnya. Ini menandakan bahwa program tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sementara, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat secara lebih berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi BPNT di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat dapat dikatakan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, yang mendorong redistribusi kekayaan kepada yang berhak. Namun, masih diperlukan evaluasi berkala untuk memastikan tidak ada masyarakat yang layak terlewat dari bantuan ini. Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat menunjukkan peran signifikan program ini dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan dan kesejahteraan. Data yang diperoleh dari wawancara dengan aparat kelurahan, agen e-warung, dan penerima manfaat mengindikasikan adanya tantangan dalam distribusi dan pemanfaatan bantuan, meskipun sebagian besar masyarakat merasa terbantu.

Teori Kesejahteraan Masyarakat menjelaskan bahwa kesejahteraan tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi, melainkan juga oleh kondisi sosial dan kesehatan. Dalam konteks ini, program BPNT diharapkan dapat menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Namun, ketidakmerataan distribusi dan beberapa penerima yang tidak memanfaatkan bantuan dengan tepat menunjukkan bahwa implementasi program perlu dievaluasi lebih lanjut.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu penerima BPNT di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, Ibuk Tiomsah simanungkalit menyatakan bahwa:

“ ibuk sudah menerima BPNT kurang lebih sudah sekitar 3 tahun yang lalu dengan bantuan sembako berupa beras, telur, minyak, gula, dan bahan sembako lainnya sehingga bisa membantu kebutuhan makanan keluarga kami dan sedikit mengurangi beban pengeluaran juga, pihak menyampaikan kepada saya bahwa jumlah BPNT ini Rp200.000 setiap bulan.” Kemudian Pernyataan ini diperkuat dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu staff Kelurahan nai Pos-Pos Barat, Bapak Ali Ahmad Marbun, beliau menyampaikan bahwa:

“BPNT ini adalah bantuan pangan non tunai yang diberikan kepada maysrakat yang kurang mampu. Untuk Kriteria Penerima BPNT ini dia masuk data DTKS, kalau data DTKS untuk ukurannya apakah dia masuk golongannya yaitu apabila 1-5 dalam data DTKS itu termasuk golongan masyarakat yang kurang mampu, dang untuk 6-10 itu termasuk golongan yang mampu, jadi kami aparat kelurahan menyesuaikan juga dengan data, begitulah kira-kira.” “Masyarakat yang mendapat BPNT ini sudah sesuai dengan data DTKS. Dan untuk jumlah saldo BPNT ini memang sebesar Rp200.000 dan itu sudah ketentuan dari pemerintah pusat.”

Pendapat ini diperkuat oleh Bapak Ali Ahmad Marbun, staf Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, yang menguraikan kriteria penerima BPNT berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Bapak Ali menjelaskan bahwa masyarakat yang menjadi penerima adalah mereka yang masuk dalam kategori kurang mampu, sesuai dengan data yang telah diverifikasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Ibuk Tiomsah Simanungkalit, penerima BPNT, dan Bapak Ali Ahmad Marbun, staf Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di wilayah tersebut menunjukkan

kecenderungan positif dalam pencapaian tepat sasaran. Ibu Tiomsah mengungkapkan bahwa bantuan sembako yang diterimanya, seperti beras, telur, dan minyak, telah membantu meringankan beban pengeluaran dan memenuhi kebutuhan makanan keluarganya. Pernyataan ini mencerminkan tujuan utama BPNT untuk memberikan akses pangan kepada masyarakat kurang mampu, yang selaras dengan prinsip-prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam ekonomi Islam.

Dari sudut pandang Bapak Ali, kriteria penerima BPNT yang diacu dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menegaskan bahwa pemerintah telah melakukan upaya sistematis dalam menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Dengan mengklasifikasikan masyarakat berdasarkan kondisi ekonomi mereka, aparat kelurahan berupaya agar penyaluran bantuan tepat sasaran. Kriteria berdasarkan DTKS yang membedakan golongan masyarakat kurang mampu dan mampu, menunjukkan adanya perhatian terhadap prinsip keadilan sosial, yang merupakan inti dari ekonomi Islam.

Penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu staf pendamping pengurus BPNT terkait implementasi program BPNT ini di kelurahan Nai Pos-Pos barat, Ibu Syuhada Batubara, beliau menyampaikan bahwa:

“Saya bertugas sebagai pendamping pengurus BPNT di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat. Program BPNT atau bantuan pangan non tunai ini adalah program pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu. BPNT ini diberikan berupa uang yang bisa ditarik di agen e-warung yang sudah kami tunjuk untuk tempat belanja para penerima KPM. BPNT ini harus dibelanjakan untuk membeli beras, telur, minyak dan sembako lainnya.” “Kalau untuk kriteria menjadi penerima BPNT adalah masyarakat yang terdaftar dalam data penerima bantuan sosial, yang masuk kategori keluarga yang kurang mampu, yang biasanya kami data mulai dari tingkat pendapatan dan keadaan tempat tinggalnya yang benar-benar layak dan membutuhkan dan juga masyarakat yang sudah terdaftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau sekarang yang diganti menjadi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN).” “Untuk mekanisme penerimaan BPNT di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat ini, KPM hanya perlu datang ke agen e-warung dengan membawa kartu sembako tanpa perlu membawa identitas diri lagi untuk menarik saldo yang masuk ke rekening KPM dan mengikuti proses yang sudah ditentukan. Setiap bulan, saldo bantuan akan masuk ke kartu sembako, jadi penerima bisa langsung menggunakan untuk membeli kebutuhan pangan.”

Wawancara dengan Ibu Syuhada Batubara, staf pendamping pengurus BPNT, mengungkapkan bahwa program ini bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu dengan menyediakan bantuan pangan yang dapat diakses melalui agen e-warung. Menurutnya, proses penerimaan BPNT diatur agar penerima, yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN), dapat menarik bantuan tanpa perlu membawa identitas tambahan, yang mempermudah akses untuk keluarga penerima manfaat (KPM).

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh Bapak Alam Syahrul Marbun, pemilik agen e-warung, yang menegaskan perannya dalam menyalurkan bantuan dan menyediakan sembako yang diperlukan oleh penerima. Pemilik agen e-warung di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, bapak Alam Syahrul Marbun menyampaikan bahwa:

“saya sebagai pemilik agen e-warung membantu untuk pencairan saldo yang masuk ke rekening penerima KPM dan menyediakan pasokan barang sembako oleh penerima. BPNT ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu, saya selaku agen e-warung yang membantu menyediakan barang sembako, seperti beras, telur, gula, minyak, sayuran dan bahan sembako lainnya.”

Kemudian ibu Syuhada menyampaikan bahwa:

“pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Nai Pos-pos barat sejauh ini cukup baik. Kami selalu berusaha untuk memastikan bantuan sampai ke orang yang berhak menerima. Kalau untuk keluhan sebagian masyarakat di kelurahan Nai Pos-Pos Barat ini ada yang belum mendapat BPNT dan layak, kami sudah memasukkan data nya ke dinas sosial, tapi kami selaku staff pendamping hanya bisa membantu mengirim data dan kami juga selalu konfirmasi dengan dinas sosial untuk proses data selanjutnya yang menerima BPNT di setiap tahunnya. Kami juga selalunya berusaha untuk membantu proses penerima BPNT, tapi kembali lagi itu semua sudah otomatis dari pusat jadi kami meminta

kepada masyarakat yang belum menerima BPNT diharapkan bisa bersabar menunggu proses hasil dari pusat.”

Ibuk syuhada juga menyampaikan bahwa proses pendataan yang dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran penerima, yang pernyataannya:

“iya dek, masyarakat yang menerima BPNT ini sudah melalui proses verifikasi data. Namun kami tetap terbuka untuk menerima masukan dari masyarakat jika ada yang merasa tidak layak atau sebaliknya.” Dan ya kami juga memang sering menerima keluhan penerima BPNT mengenai masalah keterlambatan penyulurannya, memang pernah mengalami keterlambatan, tapi itu masalah dari tingkat pusat atau dalam proses pengiriman dana dari pusat belum masuk ke rekening para penerima KPM. kami juga sebagai pendamping penyaluran BPNT di kelurahan Nai Pos-Pos Barat kalau ada informasi dari dinas sosial mengenai keterlambatan BPNT kami juga akan sampaikan kepada masyarakat jika ada keterlambatan agar mereka tetap sabar dan tidak perlu khawatir. “Untuk nominalnya memang sebesar Rp200.000, dan itu sudah ketentuan dari pusat pada saat pertama program ini dilaksanakan.”

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), terdapat mekanisme yang memungkinkan bantuan ini dicabut atau diganti berdasarkan evaluasi kondisi ekonomi penerima. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Syuhada Batubara, beliau menyampaikan:

“Dan ya, BPNT ini bisa dicabut atau diganti dari daftar penerima jika ada perubahan dalam kondisi ekonomi mereka makanya kami selalu melakukan pendataan untuk terus update perkembangan masyarakat di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, seperti jika mereka sudah mendapatkan pekerjaan yang stabil atau jika ada informasi yang menunjukkan bahwa keluarganya tidak layak lagi mendapat BPNT itu terjadi kalau ada dalam salah satu anggota di kartu keluarga nya ada yang lolos PPPK.” Untuk pendataan penerima KPM kami lakukan dua kali dalam satu tahun. Setiap satu kali 6 bulan kami melakukan pendataan rutin untuk memastikan daftar penerima selalu akurat karna data yang dikirim ke pusat harus ada perkembangan satu tahun ada yang berubah di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat atau tidak.” “Kalau menurut ibuk yah nak, implementasi program BPNT ini sudah cukup sesuai. Kami selalu berusaha untuk menjaga kejujuran dalam proses pendataan dan penyaluran. Informasi juga jelas kami berikan berupa besar BPNT ini. Kalau dalam hal tolong menolong jelas program ini sangat membantu masyarakat yang kurang mampu di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, karena dengan BPNT ini bisa membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.” Karna kalau kami sedang melakukan pendataan ke lapangan langsung ke para penerima KPM, mereka menyampaikan bahwa bantuan ini membuat sedikit lebih mudah untuk mengurangi pengeluaran bulanan. Tapi tentu saja program ini memang tidak bisa menyelesaikan semua masalah perekonomian setiap keluarga, tapi setidaknya ada keringanan dari pemerintah untuk membantu membeli bahan pangan sehari-hari. Jadi kalau saya pikir, untuk dampak program baik dan positif untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat.”

Hasil wawancara yang dilakukan dengan staf pendamping program BPNT di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini secara keseluruhan dinilai cukup baik. Hal ini tercermin dari upaya mereka untuk memastikan bahwa bantuan sampai kepada masyarakat yang berhak menerima. Meskipun ada keluhan dari beberapa masyarakat tentang penerima yang belum mendapatkan BPNT, pihak pendamping menyatakan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan dinas sosial dan mengirimkan data yang diperlukan untuk memproses penerima baru. Namun, mereka juga menjelaskan bahwa proses ini tergantung pada sistem otomatis dari pusat, sehingga masyarakat diminta untuk bersabar dalam menunggu distribusi bantuan.

Staf pendamping tersebut juga mengakui adanya masalah keterlambatan dalam penyaluran dana, yang di luar kendali mereka. Mereka berkomitmen untuk transparan dengan masyarakat, memberi tahu jika ada keterlambatan agar masyarakat tidak khawatir. Selain itu, mereka melakukan pendataan penerima secara rutin dua kali setahun untuk memastikan bahwa data penerima selalu akurat dan terkini. Hal ini penting agar bantuan dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, terutama jika terdapat perubahan dalam kondisi ekonomi para penerima.

Staf pendamping merasa bahwa implementasi program BPNT cukup sesuai dengan tujuan awalnya untuk membantu masyarakat kurang mampu. Mereka menekankan pentingnya transparansi dalam

proses pendataan dan penyaluran bantuan, serta menjelaskan besaran bantuan yang diterima. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan konflik dalam komunitas. Selain itu, penerima bantuan sering mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana, yang membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Keterlambatan tersebut sering kali disebabkan oleh masalah administratif dari pihak pusat, yang berdampak langsung pada penerima.

Bantuan tersebut, meskipun tidak dapat menyelesaikan semua masalah ekonomi, memberikan kontribusi berarti dalam mengurangi beban pengeluaran bulanan masyarakat. Dengan demikian, BPNT diyakini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat. Penerima bantuan, terutama dalam program seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sering menghadapi berbagai masalah yang dapat mempengaruhi efektivitas bantuan tersebut. Salah satu masalah utama adalah ketidakakuratan dalam pendataan penerima. Banyak masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tidak terdaftar atau tidak mendapatkan bantuan meskipun memenuhi syarat, sementara mereka yang tidak layak mungkin masih tetap mendapatkan bantuan. Dalam kasus di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat ini, penerima juga merasa bingung mengenai cara menggunakan bantuan, terutama dalam memilih sembako yang sesuai dengan ketentuan program, sehingga ada yang memanfaatkan bantuan tidak secara optimal.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu penerima KPM di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, yaitu Bapak Jones Pasaribu yang menyampaikan yang pernyataannya:

“Saya adalah salah satu penerima BPNT sejak tahun 2020, saya bekerja sebagai nelayan dan istri saya hanya ibu rumah tangga dan penghasilan saya itu sebulan kadang tidak menentu, kalau nelayan gaji nya tidak tetap, gaji kami tergantung hasil ikan yang kami tangkap, dalam satu bulan kisaran gaji kami sekitar Rp1.000.000-Rp1.200.000, dan itu sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, tapi dengan adanya BPNT ini saya menjadi terbantu untuk memenuhi kebutuhan seperti beras, telur dan sembako lainnya. Untuk keterlambatan pencairan pernah juga, seperti bulan kemarin BPNT saya tidak cair selama 2 bulan, sedangkan penerima BPNT yang lain sudah dapat dicairkan, pemilik agen e-warung mengatakan bahwa mungkin itu sedang di proses dan saya disuruh kembali cek diakhir bulan dan biasanya akan dicairkan sekaligus dengan BPNT pada bulan kemarin. Jumlah BPNT yang saya terima dari awal saya mendapatkan BPNT ini adalah Rp200.000 dan dibelanjakan di agen e-warung yang sudah ditentukan aparat kelurahan. Sejauh ini saya mendapatkan BPNT jumlah dan kualitas bahan sembako yang saya dapatkan bagus dan itu semua sangat membantu mengurangi pengeluaran keluarga kami.”

Dari wawancara dengan seorang penerima BPNT yang bekerja sebagai nelayan, terdapat beberapa temuan penting tentang bagaimana program ini berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Pertama, penerima menjelaskan bahwa ia mulai mendapatkan BPNT sejak tahun 2020. Pekerjaannya sebagai nelayan memiliki ketidakpastian pendapatan, dengan penghasilan bulanan berkisar antara Rp1.000.000 hingga Rp1.200.000. Pendapatan yang tidak menentu ini sangat mempengaruhi kemampuan keluarganya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa banyak masyarakat yang bergantung pada bantuan sosial untuk membantu mencukupi kebutuhan dasar mereka.

Penerima mengungkapkan bahwa dengan adanya BPNT, ia merasa terbantu, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga seperti beras, telur, dan sembako lainnya. Bantuan sebesar Rp200.000 per bulan ini sangat berarti bagi keluarga yang hidup dalam situasi ekonomi yang sulit. Hal ini mencerminkan tujuan utama dari program BPNT, yaitu untuk membantu masyarakat kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Meskipun BPNT memberikan manfaat, penerima juga mengalami masalah terkait keterlambatan pencairan dana. Ia menyebutkan bahwa pada bulan kemarin, bantuan tidak cair selama dua bulan, sementara penerima lainnya sudah mendapatkan bantuan mereka. Keterlambatan ini bisa menjadi sumber kekhawatiran bagi penerima yang sangat bergantung pada bantuan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam proses administrasi yang terlibat dalam penyaluran bantuan.

Sebagaimana terdapat dalam QS. Al-Anfal: 60
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَءَاخِرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ
وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya: Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan).

Dalam QS. Al-Anfal: 60, yang menekankan pentingnya persiapan dan penguatan untuk menghadapi tantangan, pelaksanaan program BPNT juga memerlukan kesiapan dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul. Pelatihan sumber daya manusia, dan peningkatan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat sangat penting agar program dapat berjalan dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan oleh semua pihak yang berhak.

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, dalam konteks BPNT, "kekuatan" yang dimaksud bisa diartikan sebagai kekuatan sistem, data, dan kemitraan antara pemerintah, agen e-warung, dan masyarakat. Dengan persiapan yang matang, program dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan tujuan awal, yaitu memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu secara efektif dan efisien.

Temuan ini juga menekankan pentingnya peran program sosial dalam mendukung masyarakat yang berpenghasilan rendah. Dengan adanya bantuan, penerima merasa bahwa kebutuhan pangan mereka lebih terjamin, yang berkontribusi dalam mengurangi beban pengeluaran bulanan keluarga. Ini adalah landasan bagi program- program sejenis untuk terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.

Pemilik agen e-warung memberikan penjelasan mengenai keterlambatan tersebut dan menyarankan penerima untuk memeriksa status pencairan di akhir bulan. Meskipun ada penjelasan, ketidakpastian tentang waktu pencairan bantuan dapat menambah khawatir bagi penerima yang sudah berada dalam kondisi keuangan yang sulit. Hal ini mengingatkan pentingnya komunikasi yang jelas antara aparat dan penerima agar masyarakat tidak merasa bingung atau cemas. Hal ini terbukti dari penjelasan agen E-warung, Bapak Alam Syahrul Marbun yang menyampaikan bahwa:

“saya selaku agen e-warung yang membantu menyediakan barang sembako, seperti beras, telur, gula, minyak, sayuran dan bahan sembako lainnya. Tetapi yang menjadi kendala saya sebagai agen e-warung itu biasanya kami sering mengalami kendala pasokan barang yang tidak stabil. Kadang-kadang, barang yang kami butuhkan tidak selalu tersedia, jadi kami sulit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Komunikasi kami dengan aparat kelurahan seringkali tidak efektif terkait data penerima, seperti informasi tidak disampaikan dengan jelas, sehingga kami salah paham terkait total penerima sehingga membuat barang pasokan yang kami sediakan kadang menjadi kurang dan membuat masyarakat banyak yang komplek kepada kami dan itu sangat menjadi masalah yang harusnya bisa diperbaiki lagi kedepannya.”

Penulis mengumpulkan data dari setiap penerima KPM dan untuk membandingkan dari setiap pendapat penerima, penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu penerima BPNT, Ibuk Jamila Situmeang, yang menyampaikan pernyataan:

“Saya sudah menjadi penerima BPNT sekitar kurang lebih 4 tahun, saya sangat terbantu dengan adanya BPNT ini. “Saya rasa program ini sudah cukup tepat sasaran, karena banyak yang menerima memang membutuhkan. Tapi ada beberapa orang yang seharusnya dapat tapi belum terdaftar. Mungkin perlu lah para pendamping BPNT di kelurahan ini agar di periksa ulang untuk data penerima. Untuk jumlah BPNT yang kami terima yah memang sebesar Rp200.000 itu yang disampaikan aparat kelurahan kepada kami pada saat pembagian kartu BPNT di Kantor Camat Sorkam. Pada saat BPNT cair kami dimintak datang ke agen e-warung yang sudah dipilih oleh aparat kelurahan dengan membawa kartu BPNT dan membelanjakan uang BPNT di e-warung itu untuk membeli sembako.”

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu penerima KPM, Ibuk Leni Situmeang, beliau juga memberikan pernyataan:

“Saya menerima BPNT baru ditahun ini tepat nya di bulan juni 2025, Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu keluarga saya.” Menurut saya, penyaluran BPNT di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat ini belum tepat sasaran, karna kayak saya dek sudah lama di data sejak tahun 2020 itu pas masih masa Covid-19, dan pada tahun ini ibuk baru mendapatkan BPNT, setaip kali aparat Kelurahan melakukan pendataan mereka selalu meminta fotokopi kartu keluarga untuk di proses, tapi baru tahun ini lah baru bisa mendapatkan BPNT di tahun 2025 ini. Para pendata di Kelurahan nai Pos-Pos Barat ini terlalu banyak bertele-tele. Setiap sekali 6 bulan selalu mintak fotokopi kartu keluarga untuk verifikasi data sama kami. Di tahun 2024 dibulan Desember tahun lalu saya baru dimintak dating ke Kantor Kelurahan untuk menyerahkan berkas fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi KTP, katanya untuk membuat data diri dan disuruh menunggu beberapa bulan baru bisa mendapatkan kartu sembako”. Dan ya, baru sekaranglah nak, ibuk dapat BPNT ini. Untuk bantuan yang ibuk teriman di setiap bulannya saldo Rp200.000 masuk ke rekening kartu sembako dan dimintak membelanjakan nya di agen E-Warung yang dipilih khusus oleh petugas Kelurahan.”

Berdasarkan temuan wawancara ini menunjukkan berbagai perspektif penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat yang menggambarkan suasana program dan tantangan yang dihadapi. Ibuk Jamila Situmeang, yang telah menerima BPNT selama empat tahun, merasa terbantu oleh program ini dan menganggapnya cukup tepat sasaran, meskipun ada beberapa individu yang seharusnya menerima tetapi belum terdaftar.

2. Dampak adanya program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan masyarakat di Kel. Nai Pos-Pos Barat, Kec. Sorkam

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan yang penulis lakukan mengenai bagaimana dampak adanya program BPNT terhadap kesejahteraan pendapat penerima KPM di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat dengan ibuk Tiomsah Simanungkalit menyampaikan, bahwa:

“Bantuan ini sangat membantu keluarga Ibuk dek, dengan bahan sembako ini bisa membantu kebutuhan makanan keluarga kami dan sedikit mengurangi beban pengeluaran juga. Harapan kedepannya bisa lah menjadi baik tidak perlu ditetapkan tempat belanja, supaya kami bisa belanja ke toko lain, karena mahal-mahal harga sembako kadang di agen e-warung ini, mereka kesempatan kadang menaikkan harganya itu.”

Kenaikan harga yang tidak terkendali di agen tersebut membuatnya berharap dapat belanja di toko lain yang mungkin menawarkan harga lebih terjangkau.

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah satu penerima KPM, yang disampaikan oleh, Bapak Jones Pasaribu, yang pernyataannya:

“Sejauh ini saya mendapatkan BPNT jumlah dan kualitas bahan sembako yang saya dapatkan bagus dan itu semua sangat membantu mengurangi pengualaran keluarga kami. Jadi uang belanja yang sebelumnya bisa membayar uang sekolah anak.”

Kemudian Salah satu penerima KPM yaitu Ibuk Jamila Situmeag menyampaikan pernyataanya yang berbeda mengenai bagaimana dampak adanya BPNT ini, yaitu:

“Jadi begini dek, ibuk rasa untuk bantuan BPNT ini kan Rp200.000/bulan, kalau untuk ibuk pribadi ya kadang kurang lah yah, karna kita sama-sama tahu juga kalau di kampung ini semua serba mahal, jadi BPNT ini harus pandai-pandailah memilih sembako yang dibeli dan pilih yang paling penting dan utama, kalau ibuk beras nya selalu ibu utamakan yang paling banyak ibu beli. Kalau untuk jumlah nya cukup membantu, tapi kualitas nya saja kurang, masalah ini selalu kami keluhkan kepada ibuk pendamping pengurus BPNT, harapan kami kedepannya agen E-Warung bisa menyediakan bahan pangan yang lebih berkualitas setiap bulannya. Sebelum ada BPNT ini kondisi kami cukup sulit membagi hasil pendapatan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, belum lagi untuk biaya sekolah anak-”

anak. Tapi kami sangat bersyukur karna setelah menjadi penerima BPNT ini menjadi sangat terbantu karna bisa dapat sembako setiap bulan.”

Ibu Lenni Situmeang menyampaikan pernyataannya melalui wawancara yang penulis lakukan, bahwa:

“Jumlah yang saya terima itu Rp200.000 dek, kalau masalah cukup atau tidaknya, yah saya cukup-cukupkan lah dek, kadang cukup, kadang tidak, karna harga bahan pangan di Sorkam ini sering naik jadi kalau bisa dapat yang lebih murah Alhamdulillah, tapi kadang-kadang harus mengatur kalilah biar semuanya cukup sampai akhir bulan. Jumlah bahan pangan yang kami terima ini sangat membantu, walaupun kualitasnya sama tiap bulan. Sebelum jadi Penerima BPNT, kondisi keuangan keluarga saya cukup berat, kadang kami sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi setelah ada BPNT, walaupun tidak semuanya tercukupi, tapi bisalah membantu keluarga kami, kami bisa membeli beras yang lebih bagus dan mudah mendapatkan sembako. Alhamdulillah sekali dek, BPNT sangat membantu kesejahteraan kami, karna kami bisa mendapatkan sembako setiap bulannya. Makanan kami lebih terjamin, dengan adanya bantuan sembako setiap bulannya. Meskipun belum sepenuhnya memperbaiki keadaan kami, setidaknya dengan adanya bantuan ini, kami bisa merasa tenang dan bisa membayar keperluan untuk biaya yang lain.”

Berbeda dengan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan penerima KPM, Ibu Siti Mariam yang menyampaikan pernyataannya:

“BPNT ini memang sangat membantu kalilah untuk seperti kami yang dapat ini, tapi penting juga lagi mengecek data-data masyarakat kelurahan Nai pos-pos barat supaya tidak ada yang terlewat. Kalau ibuk sih berharap mudah-mudahan bisalah kedepannya staf-staf pendamping pengurus BPNT ini kembali lebih teliti dalam mendata masyarakat di kelurahan Nai Pos-Pos Barat ini. BPNT ini sangat membantu, tapi harapan kami kedepannya bisa lah lebih baik lagi kedepannya kalau menyediakan sembako nya lengkap.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan penerima Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, terdapat variasi dalam pengalaman dan pandangan terhadap dampak program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) terhadap kesejahteraan masyarakat. Dari analisis kualitatif yang dilakukan, terlihat bahwa meskipun BPNT memberikan manfaat yang signifikan, seperti membantu memenuhi kebutuhan pokok dan mengurangi beban pengeluaran, masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti kenaikan harga sembako dan ketidakakuratan dalam pendataan penerima. Misalnya, Ibuk Tiomsah dan Bapak Jones menggambarkan bagaimana bantuan yang diterima sangat membantu dalam mengurus kebutuhan sehari-hari, sekaligus mengalihkan sejumlah uang yang sebelumnya digunakan untuk sembako ke kebutuhan lain, seperti pendidikan anak. Namun, Ibuk Jamila menyoroti bahwa meskipun ada bantuan, jumlahnya sering kali tidak mencukupi, dan kualitas sembako yang diterima perlu ditingkatkan.

Penelitian ini mengidentifikasi dari setiap wawancara, yaitu masalah distribusi, dan harapan peningkatan kualitas. Hal ini sejalan dengan teori kesejahteraan masyarakat yang menekankan pentingnya akses yang adil dan merata terhadap kebutuhan dasar, serta faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Sebagai contoh, Ibu Siti Mariam menggarisbawahi perlunya keakuratan dalam pendataan agar tidak ada yang terlewat dari penerimaan manfaat, menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat dapat terpengaruh oleh kebijakan bantuan yang tidak tepat sasaran.

Penting bagi pengelola program BPNT untuk meningkatkan komunikasi dan transparansi dalam setiap tahap, mulai dari pendataan hingga penyaluran bantuan. Pihak terkait perlu memastikan bahwa semua penerima bantuan dapat mengakses informasi dengan jelas dan cepat terkait dengan mekanisme program. Selain itu, monitoring berkala terhadap kualitas sembako yang disuplai di E-Warung juga harus dilakukan, agar bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Rekomendasi ini diharapkan dapat mendukung perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan program BPNT di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, sehingga tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan optimal.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat, dapat disimpulkan bahwa program ini memiliki dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Banyak penerima yang merasakan bantuan ini membantu memenuhi kebutuhan pokok mereka, seperti beras dan sembako lainnya, dan mengurangi beban pengeluaran mereka. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya transparansi dan keadilan dalam distribusi bantuan. Beberapa penerima menginginkan perbaikan dalam mekanisme pendataan agar lebih akurat, sehingga semua yang berhak dapat menerima bantuan tanpa terkendala. Selain itu, penyaluran bantuan yang tepat waktu juga menjadi salah satu harapan masyarakat, yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap program pemerintah. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan keadilan dan tanggung jawab sosial dalam penyaluran bantuan.

Referensi

1. Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Suka-Press UIN Sunan Kalijaga.
2. Almahmudi, Nufi Mu'tamar. (2019). Konsep Kesejahteraan dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum Islam", *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam*. 1 (2)
3. Amirudin. 2014. *Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Au Press.
4. Asrin, Asrin. "Evaluasi Kebijakan BPNT Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Pada Keluarga Miskin Di Kelurahan Baadia Kota Baubau. *Journal of Government Science Studies* 1, no. 2 (2022): 86–94.
5. Basrowi, S. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
6. Destina Mae Tika, Abd. Malik, and Nurlia Fufita. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Riset Manajemen dan Akuntansi*. 3 (3) 293–311.
7. Imelda, Muthia, and Nur Ari Sufiawan. "Analisis Dampak Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Di Kota Payakumbuh Pada Masa Covid-19 [Analysis of the Impact of Non-Cash Food Assistance (BPNT) in Meeting the Food Needs of Beneficiary Fami." *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 5, no. 1 (2022): 80–94.
8. Julianto, Pebi. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kecamatan Sitingau Laut Kabupaten Kerinci." *Qawwam: The Leader's Writing* 1, no. 1 (2020): 38–43. <https://doi.org/10.32939/qawwam.v1i1.77>.
9. Pasaribu, Jones. (2025). Wawancara dengan Salah Satu Bapak Penerima KPM di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat. Nai Pos-Pos barat, Kec. Sorkam, Senin 19 Desember, Pukul 14:30 Wib.
10. Rahmah, Syahidah. (2020). Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam. *Ar-Ribh: Jurnal Ekonomi Islam* 3 (2) 5-7
11. Safrudin, Rizal, Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. (2023). "Penelitian Kualitatif." *Journal Of Social Science Research*, 3 (2) 1–15.
12. Sinaga, Dameria. *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*, 2023.
13. Situmeang, Jamila. (2025). Wawancara dengan Salah Satu Ibu Penerima KPM di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat. Nai Pos-Pos barat, Kec. Sorkam, Senin 22 Desember, Pukul 20:30 Wib.
14. Srimurni, Titis, and Millatus Sholihah. (2022). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Desa Duren Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. *Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 2 (4) 309–316.
15. Simanungkalit, Tiomsah. (2025). Wawancara dengan Salah Satu Ibu Penerima KPM di Kelurahan Nai Pos-Pos Barat. Nai Pos-Pos barat, Kec. Sorkam, Rabu 17 Desember, Pukul 16:00 Wib.
16. Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.